

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM DAN SISA
LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TERHADAP BELANJA MODAL PADA
KABUPATEN YANG ADA DI PROVINSI SUMATERA UTARA
PERIODE 2017-2021**

Monika Romasari Sinaga¹ , Imelda Rimenda Purba²

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Katolik Santo Thomas

Email : monikasinaga.students.ust@gmail.com, imelda.rimenda.purba@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of Regional Original Revenue, General Allocation Fund, and Remaining Budget Calculation Surplus on Capital Expenditures in Regencies in North Sumatra Province for the period 2017-2021. The population of this study were 25 regencies in North Sumatra Province. The sampling method used was purposive sampling method, so that 6 districts were obtained with a 5-year research period. The research method used is quantitative using secondary data sourced from the website of the Directorate General of Fiscal Balance of the Republic of Indonesia. The data analysis technique used is descriptive statistics, then classical assumption testing, multiple regression analysis and hypothesis testing. Based on the discussion, it shows that Regional Original Revenue has a positive and significant effect on Capital Expenditure, this can be seen from the partial test calculation obtained from the tcount value of 3.333 with a significance value of 0.003. General Allocation Fund has no effect on Capital Expenditure, this can be seen from the partial test calculation obtained from the tcount value of -0.446 with a significance value of 0.659. And, SiLPA has no effect on Capital Expenditure, this can be seen from the partial test calculation obtained from the tcount value of -0.348 with a significance value of 0.731. Simultaneously, Regional Original Income, General Allocation Fund, and SiLPA have a positive and significant effect on Capital Expenditure, this can be seen from the simultan test calculation obtained from the f-count value of 6,174 with a significance value of 0,003.

Keywords: *Regional Original Income, General Allocation Funds, Budget Surplus Calculations and Capital Expenditures*

PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (6) perubahan atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Pasal 1 ayat (5) tentang Otonomi Daerah. Otonomi Daerah merupakan hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Diberlakukannya UU No. 23 Tahun 2014 tersebut memberikan kewenangan dan keleluasaan bagi pemerintah daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota sebagai pelaksana dan promotor pembangunan di daerah untuk mengatur dan menentukan sendiri kegiatan pembangunan wilayah yang sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat setempat. Dengan demikian, salah satu langkah bagi Pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan kepada publik yakni dengan mengalokasikan anggaran belanja modal yang tercipta dari adanya aktivitas pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana di daerah.

Berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010, Belanja Modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap yang memberikan manfaat lebih dari satu periode. Belanja modal antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, peralatan dan mesin, bangunan dan gedung, jalan, irigasi dan jaringan serta aset tetap lainnya. Belanja modal bertujuan untuk menyediakan sarana dan prasarana fasilitas

publik yang dapat menjadi penunjang terlaksana berbagai aktivitas ekonomi masyarakat. Alokasi belanja modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah maupun untuk fasilitas publik. Namun pada kenyataannya belanja modal masih belum menjadi perhatian penting dalam pemerintah daerah. Pemerintah daerah masih belum berorientasi kepada belanja langsung berupa pembangunan infrastruktur yang mendukung pembangunan daerah. Selama ini belanja daerah lebih banyak digunakan untuk belanja rutin yang relatif kurang produktif (Wandira, 2013). Berdasarkan informasi Kajian Fiskal Regional Provinsi Sumatera Utara di Tahun 2021 yang di terbitkan oleh Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Utara menyatakan bahwa arah kebijakan sumut tahun terakhir (2019-2021) untuk menuju kemandirian fiskal belum tergambar dari besaran pagu pada postur belanja, lebih dari 60% alokasi belanja masih di arahkan kepada Belanja Operasi yang kemudian lebih dari 30% di peruntukkan untuk membiayai belanja pegawai sehingga belum dimaksimalkan untuk alokasi belanja yang bertujuan untuk membangun daerah dan mensejahterakan masyarakat. Dari fenomena ini menunjukkan bahwa belanja operasi masih memberikan kontribusi terbesar terhadap belanja daerah yang menandakan bahwa pemerintah belum menempatkan belanja modal sebagai prioritas belanja daerah yang membuat asumsi bahwa keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat belum sesuai dengan harapan.

Otonomi daerah membuat segala kegiatan infrastruktur atau sarana prasarana daerah dikelola oleh masing-masing daerah. Supaya bisa membiayai segala kegiatan tersebut, maka pemerintah daerah dituntut untuk bisa mengembangkan dan meningkatkan penerimaan daerah nya masing-masing dengan memaksimalkan sumber daya yang dimiliki agar bisa membiayai segala kegiatan penciptaan infrastruktur atau sarana prasarana daerah melalui alokasi belanja modal pada APBD. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan daerah yang berasal dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah. Dana Alokasi Umum atau sering disebut DAU merupakan dana yang bersumber dari APBN yang disalurkan ke pemerintah daerah untuk mengatasi kesenjangan keuangan antar daerah dan meningkatkan pelayanan kepada publik sehingga dapat digunakan untuk meningkatkan belanja modal. Menurut PP No. 71 Tahun 2010, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran dalam satu periode. Terkait dengan penjelasan diatas penelitian terhadap belanja modal telah banyak dilakukan namun beberapa penelitian seringkali memperoleh hasil yang berbeda-beda dan cenderung tidak konsisten satu sama lain dan juga menimbulkan *research gap* dari sisi hasil penelitian sebelumnya. Damanik (2021) menemukan bahwa secara parsial menunjukkan bahwa PAD, DAK, DBH berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal, namun variabel DAU dan SiLPA tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara. Angelina *et al.* (2020) dalam jurnalnya yang berjudul Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) terhadap pengalokasian Belanja Modal (Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Utara) menemukan bahwa baik secara parsial maupun simultan PAD, DAU, dan SiLPA berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Oleh karena itu berdasarkan penjelasan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai: "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran terhadap Belanja Modal pada Kabupaten yang ada di Provinsi Sumatera Utara Periode 2017-2021".

DASAR TEORI

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu sumber pendapatan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah (Mardiasmo, 2002: 132).

2. Dana Alokasi Umum(DAU)

Menurut UU No. 33 Tahun 2004, Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Secara definisi Dana Alokasi Umum dapat diartikan sebagai berikut (Sidik, 2005: 25) : (1) Salah satu komponen dan perimbangan pada APBN yang pengalokasiannya didasarkan atas konsep kesenjangan fiskal atau celah fiskal yang selisih antara kebutuhan fiskal dengan kapasitas fiskal. (2) Instrumen untuk mengatasi horizontal *imbalance* yang dialokasikan dengan tujuan peningkatan kemampuan keuangan antar daerah dan penggunaannya ditetapkan sepenuhnya oleh daerah. (3) *Equalization grant*, berfungsi untuk menetralisasi ketimpangan kemampuan keuangan dengan adanya PAD, bagi hasil pajak, dan bagi hasil SDA yang diperoleh daerah otonomi dan pembangunan daerah.

3. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran(SiLPA)

Menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 Lampiran I.02 PSAP 01 Penyajian Laporan Keuangan, menjelaskan bahwa SiLPA adalah sisa lebih antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja dan sekaligus sebagai penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBN/APBD selama satu tahun periode pelaporan. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019, Sisa lebih perhitungan anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran. SiLPA merupakan penerimaan daerah yang bersumber dari kas tahun anggaran sebelumnya. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) merupakan sisa anggaran akhir tahun yang digunakan oleh pemerintah daerah untuk sumber pembiayaan, penerimaan tahun anggaran berikutnya (Pradipta, 2011: 28). SiLPA ialah pendapatan daerah yang berasal dari sisa aset di tahun anggaran sebelumnya (Halim, 2013).

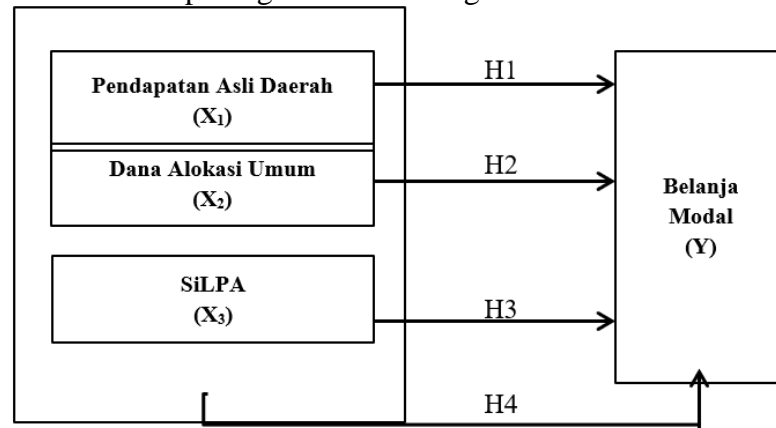
4. Belanja Modal

Belanja Modal merupakan salah satu jenis Belanja Langsung dalam APBN/APBD. Belanja modal adalah belanja yang digunakan dalam rangka pengadaan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan. Berdasarkan lampiran I.03 PSAP No. 2, Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, aset tak berwujud. Erlina (2015: 158) "Belanja Modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, serta aset tetap lainnya.

5. Kerangka Konseptual

Kerangka pikir dibangun untuk memperlihatkan hubungan yang menunjukkan kaitan antara variabel-variabel yang ada dalam penelitian. Penelitian ini menggunakan tiga variabel

bebas yakni pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan sisa lebih perhitungan anggaran dan satu variabel terikat yakni belanja modal. Berdasarkan uraian diatas maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 1. Kerangka Pikir

METODE PENELITIAN

1. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian yang ditetapkan oleh penulis meliputi Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran terhadap Belanja Modal. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder mengenai Laporan Realisasi APBD Kabupaten yang ada di Provinsi Sumatera Utara yang diperoleh dari situs resmi Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan Republik Indonesia yaitu www.djpk.depkeu.go.id tahun 2017-2021.

2. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kabupaten yang ada di Provinsi Sumatera Utara yang terdiri dari 25 Kabupaten dengan periode 2017-2021. Dalam penelitian ini sampel diambil dengan metode *purposive sampling*. Teknik *Purposive Sampling* merupakan teknik pengambilan sampel yang sampelnya diambil berdasarkan kriteria tertentu sesuai dengan tujuan penelitian yang dianggap mewakili penelitian, sehingga diperoleh 6 Kabupaten dengan periode penelitian 5 tahun.

3. Operasional Variabel

Adapun variabel yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

a. Pendapatan Asli Daerah (X1)

Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan dari sumber-sumber daerah sendiri, yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dimana terdiri dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Variabel PAD diukur dengan :

$$\text{PAD} = \text{Pajak Daerah} + \text{Retribusi Daerah} + \text{Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan} + \text{Lain-lain PAD yang sah}$$

b. Dana Alokasi Umum (X2)

Dana alokasi umum merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Alokasi Umum untuk masing-masing Kabupaten/Kota dapat dinyatakan sebagai berikut :

$$\text{DAU} = \text{Celah Fiskal} + \text{Alokasi Dasar}$$

Keterangan :

Celah Fiskal = kebutuhan fiskal – kapasitas fiskal

c. SiLPA (X3)

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) merupakan selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. SiLPA mempresentasikan sisa kas yang timbul karena realisasi pendapatan daerah yang melebihi realisasi belanja daerah. Variabel SiLPA digunakan sebagai indikator efisiensi pengeluaran pemerintah karena SiLPA hanya akan terbentuk bila terjadi surplus pada APBD sekaligus sebagai pembiayaan netto positif atau pembiayaan neto lebih besar dari defisit APBD.

d. Belanja Modal (Y)

Belanja Modal adalah belanja yang digunakan dalam rangka pengadaan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan. Indikator variabel ini diukur dengan :

Belanja Modal = Belanja Tanah + Belanja Peralatan dan Mesin + Belanja Gedung dan Bangunan + Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan + Belanja Aset Lainnya

4. Teknik Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan dan digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, Erlina (2011: 22) Data sekunder adalah data yang sudah tertera dan dikumpulkan dari pihak lain, sumber data sekunder misalnya buku, laporan perusahaan, jurnal, internet, dan sebagainya. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi yang diperoleh dengan mengunduh dokumen Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setiap Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara yang diperoleh dari website resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia (<http://www.djpk.kemenkeu.go.id>).

5. Teknik Analisis Data

Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain pengujian statistik deskriptif, uji normalitas, uji asumsi klasik, uji multikolonieritas, uji autokorelasi, uji heteroskedastisitas, analisis regresi berganda, koefisien determinasi, uji statistik f dan uji statistik t untuk mengetahui pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan sisa lebih perhitungan anggaran terhadap belanja modal pada pemerintah daerah Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara. Teknik analisis data penelitian ini menggunakan software SPSS (*Statistica Product and Service Solutions*).

1. Statistik deskriptif

Statistik deskriptif adalah menggambarkan atau mendeskripsikan suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, maksimum, minimum dan *range*". Analisis deskriptif merupakan suatu statistik yang menggambarkan atau mendeskripsikan data menjadi sebuah informasi yang lebih jelas dan mudah dipahami. Penelitian ini menjabarkan jumlah data, rata-rata, nilai minimum dan maksimum serta standar deviasi.

2. Uji Asumsi Klasik

Menurut Ghozali (2018), Uji asumsi klasik merupakan tahap awal yang digunakan sebelum analisis regresi linear berganda. Dilakukannya pengujian ini untuk dapat memberikan kepastian agar koefisien regresi tidak bias serta konsisten dan memiliki ketepatan dalam estimasi. Uji asumsi klasik dilakukan untuk menunjukkan bahwa pengujian yang dilakukan telah lolos dari uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas sehingga pengujian dapat dilakukan ke analisis regresi linear.

a. Uji Normalitas

Menurut Ghazali (2018: 161) menyatakan bahwa uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah di dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal.

b. Uji Multikolineritas

Uji multikolineritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Uji multikolineritas dapat dilakukan dengan melakukan korelasi antara variabel independen dengan menggunakan *Tolerance value* dan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF).

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain (Ghozali 2018: 137).

d. Uji Autokorelasi

Menurut Ghazali (2018), Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Cara yang dapat dilakukan untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi adalah dengan uji *Durbin Watson*.

3. Metode Regresi Linier Berganda

Model regresi linier berganda adalah model regresi yang memiliki lebih dari satu variabel independen. Pada penelitian ini terdapat tiga variabel independen, yakni PAD, DAU, dan SiLPA. Model regresi linier berganda dikatakan model yang baik jika model tersebut memiliki asumsi normalitas data dan terbebas dari asumsi-asumsi klasik statistik baik multikolineritas, autokorelasi dan heteroskedastisitas.

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan :

Y	= Belanja Modal
α	= Konstanta
X_1	= Pendapatan Asli Daerah (PAD)
X_2	= Dana Alokasi Umum (DAU)
X_3	= Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)
$\beta_1, \beta_2, \beta_3$	= Koefisien Regresi
e	= Standar Error

4. Uji Hipotesis

a. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2018).

b. Uji Parsial (Uji t)

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas/independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Uji t dalam penelitian ini menggunakan signifikansi 5%.

c. Uji Simultan (Uji F)

Menurut Ghazali (2018: 98) uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen/terikat.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 1. Statistik Deskriptif

<i>Descriptive Statistics</i>					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PAD (X1)	30	26917795029	252663015527	107487531431.30	53610399607.795
DAU (X2)	30	418883094000	1239639944134	671688365975.13	251471468132.484
SiLPA (X3)	30	21908809436	346969548787	110320126372.87	83486017907.284
Belanja Modal (Y)	30	66583199217	405283313970	198506097993.10	83924477332.757
Valid N (listwise)	30				

Sumber: Data diolah dengan SPSS versi 25 (2023)

Berdasarkan data dari tabel 1 dapat dilihat bahwa jumlah sampel (N) dalam penelitian ini adalah sebanyak 30 yang terdiri dari 6 kabupaten dengan waktu pengamatan selama 5 tahun, yakni mulai dari tahun 2017 hingga 2021. Berdasarkan tabel 4.6 dapat dijelaskan bahwa :

1. Nilai minimum Pendapatan Asli Daerah adalah sebesar Rp 26.917.795.029. Nilai maksimum Pendapatan Asli Daerah memperoleh nilai Rp 252.663.025.527. Nilai keseluruhan Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara periode 2017-2021 adalah Rp 107.487.531.431,30. Nilai standar deviasi Pendapatan Asli Daerah adalah Rp 53.610.399.607,795.
2. Nilai minimum Dana Alokasi Umum adalah sebesar Rp 418.883.094.000. Nilai maksimum Dana Alokasi Umum memperoleh nilai Rp 1.239.639.944.134. Nilai keseluruhan Dana Alokasi Umum pada Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara periode 2017-2021 adalah Rp 671.688.365.975,13. Nilai standar deviasi Dana Alokasi Umum adalah Rp 251.471.468.132,484.
3. Nilai minimum Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) adalah sebesar Rp 21.908.809.436. Nilai maksimum SiLPA memperoleh nilai Rp 346.969.548.787. Nilai keseluruhan SiLPA pada Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara periode 2017-2021 adalah Rp 110.320.126.372,87. Nilai standar deviasi SiLPA adalah Rp 83.486.017.907,284.
4. Nilai minimum Belanja Modal adalah sebesar Rp 66.583.199.217. Nilai maksimum Belanja Modal memperoleh nilai Rp 405.283.313.970. Nilai keseluruhan Belanja Modal pada Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara periode 2017-2021 adalah Rp 198.506.097.993,10. Nilai standar deviasi Belanja Modal adalah Rp 83.924.477.332,757.

2. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Tabel 2. Uji Normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov

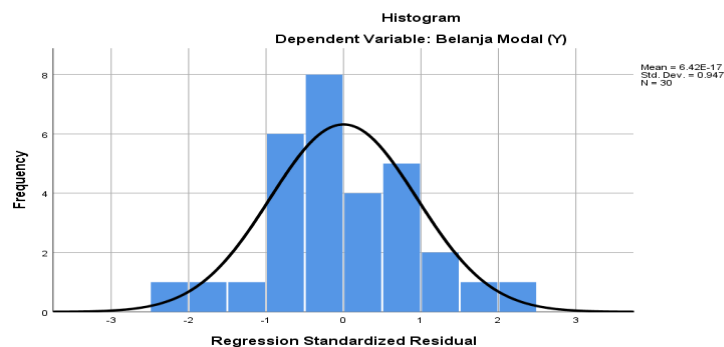
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		30
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000086
	Std. Deviation	64133264588.65445000
Most Extreme Differences	Absolute	.093
	Positive	.093
	Negative	-.090

Test Statistic	.093
Asymp. Sig. (2-tailed)	.200 ^{c,d}
a. Test distribution is Normal.	
b. Calculated from data.	
c. Lilliefors Significance Correction.	
d. This is a lower bound of the true significance.	

Sumber: Data diolah dengan SPSS versi 25 (2023)

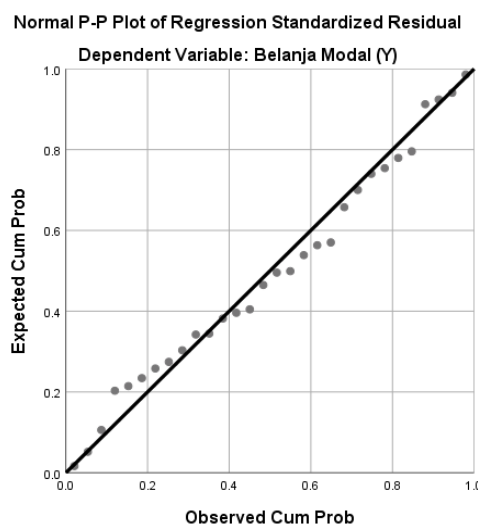
Berdasarkan tabel 2 diketahui bahwa nilai signifikan *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar 0,200 lebih besar dari 0,05 ($0,200 > 0,05$) sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang diuji berdistribusi normal.

Hasil uji normalitas menggunakan Histogram dapat dilihat pada gambar 2 berikut ini:



Gambar 2. Histogram

Grafik histogram pada gambar 2 diatas menunjukkan bahwa distribusi data mengikuti kurva berbentuk lonceng yang tidak menceng (*skewness*) ke kiri maupun ke kanan. Hal ini menunjukkan bahwa data telah terdistribusi secara normal. Hal ini juga didukung dengan menggunakan grafik *Normal Probability plot*. Hasil uji normalitas menggunakan *Normal Probability plot* dapat dilihat pada gambar 3 diberikut ini:



Sumber: Data diolah dengan SPSS versi 25 (2023)
Gambar 3. Grafik *Normal Probability Plot*

Berdasarkan grafik *Normal Probability Plot* diatas, terlihat membentuk satu garis lurus diagonal dan plotting data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal. Hal ini menunjukkan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas.

b. Uji Multikolinearitas

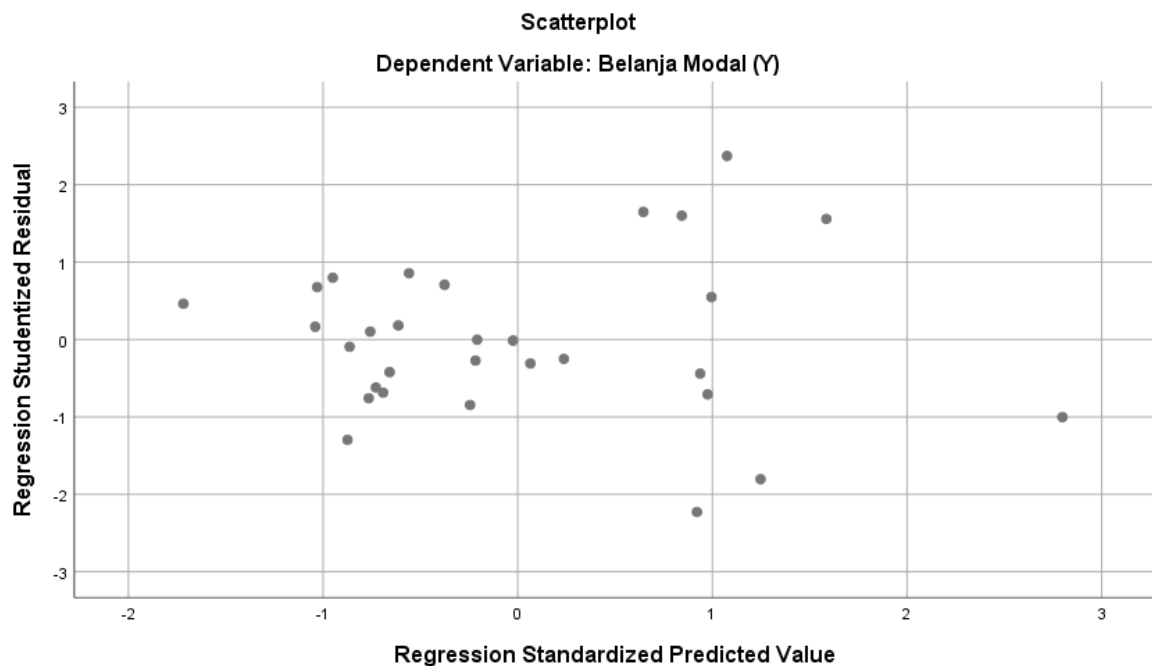
Tabel 3. Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients ^a			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	PAD (X1)	.485	2.061
	DAU (X2)	.505	1.981
	SiLPA (X3)	.945	1.058
a. Dependent Variable: Belanja Modal (Y)			

Sumber: Data diolah dengan SPSS versi 25 (2023)

Hasil uji multikolinearitas yang disajikan dalam tabel 3 menunjukkan bahwa nilai *tolerance* dari variabel PAD, DAU dan SiLPA lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF variabel-variabel tersebut lebih kecil dari 10 yang berarti model yang digunakan tidak terjadi gejala multikolinearitas.

c. Uji Heteroskedastisitas



Sumber: Data diolah dengan SPSS versi 25 (2023)

Gambar 4. Scatterplot

Berdasarkan gambar 4 terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak tidak membentuk suatu pola tertentu yang jelas serta tersebar baik diatas maupun dibawah angka nol pada sumbu Y. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.

d. Uji Autokorelasi

Cara untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi adalah dengan melakukan pengujian *Durbin-Watson* (DW), tidak terjadi autokorelasi apabila nilai $DU < DW < 4-DU$. Hasil uji autokorelasi dapat dilihat pada tabel 4 berikut ini :

Tabel 4. Hasil Uji Autokorelasi (*Durbin-Watson*)

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.645 ^a	.416	.349	67732276471.741	1.759
a. Predictors: (Constant), SiLPA (X3), DAU (X2), PAD (X1)					
b. Dependent Variable: Belanja Modal (Y)					

Sumber: Data diolah dengan SPSS versi 25 (2023)

Berdasarkan tabel diatas, hasil uji autokorelasi menunjukkan nilai statistik *Durbin Watson* (DW) sebesar 1,759. Nilai ini akan kita bandingkan dengan nilai tabel dengan menggunakan nilai signifikan 0,05 (5%), jumlah sampel 30 (N) dan jumlah independen 3 (k=3). Dari tabel *Durbin Watson* didapat nilai batas atas (DU) 1,6498, nilai batas bawah (DL) 1,2138 dan 4-DU= 2,3502. Oleh karena itu, nilai DW lebih besar dari DU dan lebih kecil dari 4-DU ($1,6498 < 1,759 < 2,3502$), dari uji statistik ini maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi

3. Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 5. Uji Analisis Regresi Linear Berganda

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	102148745641.978	35079556038.415	2.912	.007
	PAD (X1)	1.122	.337	.717	.003
	DAU (X2)	-.024	.054	-.094	.659
	SiLPA (X3)	-.054	.155	-.054	.731
a. Dependent Variable: Belanja Modal (Y)					

Sumber: Data diolah dengan SPSS versi 25 (2023)

Berdasarkan tabel 5 maka diperoleh persamaan regresi sebagai berikut :

$$Y = 102148745641,978 + 1,122X_1 - 0,024X_2 - 0,054X_3 + e$$

Interpretasi dari persamaan linier berganda tersebut adalah sebagai berikut:

- Nilai konstanta sebesar 102.148.745.641,978 menyatakan bahwa jika diasumsikan nilai dari variabel X_1 (Pendapatan Asli Daerah), X_2 (Dana Alokasi Umum), dan X_3 (SiLPA) adalah sama dengan 0 (nol), maka nilai variabel Y (Belanja Modal) adalah 102.148.745.641,978.
- X_1 adalah variabel PAD yang memiliki nilai koefisien regresi sebesar 1,122 yang berarti bahwa setiap kenaikan satu satuan variabel pendapatan asli daerah maka belanja modal juga akan mengalami peningkatan sebesar 1,122 dengan asumsi variabel lain adalah tetap.
- X_2 adalah variabel DAU yang memiliki nilai koefisien regresi sebesar -0,024 yang berarti bahwa setiap penurunan satu satuan variabel dana alokasi umum maka belanja modal akan mengalami kenaikan sebesar -0,024 dengan asumsi variabel lain adalah tetap.
- X_3 adalah variabel SiLPA yang memiliki nilai koefisien regresi sebesar -0,054 yang berarti bahwa setiap penurunan satu satuan variabel SiLPA maka variabel belanja modal akan mengalami kenaikan sebesar -0,054 asumsi variabel lain adalah tetap.

4. Uji Hipotesis

a. Koefisien Determinasi (R^2)

Apabila nilai *adjusted R square* semakin mendekati satu, maka variabel-variabel independen memberikan semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen. Sebaliknya, semakin kecil nilai *adjusted R square*, maka kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen semakin terbatas. Berikut hasil dari uji koefisien determinasi dari penelitian menggunakan program SPSS:

Tabel 6. Uji Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.645 ^a	.416	.349	67732276471.741
a. Predictors: (Constant), SiLPA (X3), DAU (X2), PAD (X1)				

Sumber: Data diolah dengan SPSS versi 25 (2023)

Berdasarkan tabel 6 nilai koefisien determinasi terletak pada kolom *Adjusted R-Square*. Diketahui nilai koefisien determinasi sebesar 0,349 yang memberikan makna bahwa variabel pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan SiLPA mampu menjelaskan perubahan terhadap variabel belanja modal sebesar 34,9% dan sisanya sebesar 65,1% dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

b. Uji Signifikan Parsial (Uji t)

Tabel 7. Hasil Uji Parsial (Uji t)

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	102148745641.978	35079556038.415		2.912	.007
	PAD (X1)	1.122	.337	.717	3.333	.003
	DAU (X2)	-.024	.054	-.094	-.446	.659
	SiLPA (X3)	-.054	.155	-.054	-.348	.731
a. Dependent Variable: Belanja Modal (Y)						

Sumber: Data diolah dengan SPSS versi 25 (2023)

Dari tabel 7, maka kesimpulan dari Uji-t adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Dari hasil perhitungan uji parsial diperoleh nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ dimana $3,333 > 2,055$ dengan tingkat signifikansi 0,003 lebih kecil dari 0,05 ($0,003 < 0,05$) maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal.

2. Dana Alokasi Umum (DAU)

Dari hasil perhitungan uji parsial diperoleh nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ dimana $-0,446 < 2,055$ dengan tingkat signifikansi 0,659 lebih besar dari 0,05 ($0,659 > 0,05$), maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Sehingga dapat dinyatakan bahwa Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal.

3. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)

Dari hasil perhitungan uji parsial diperoleh nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ dimana $-0,348 < 2,055$ dengan tingkat signifikansi 0,731 lebih besar dari 0,05 ($0,731 > 0,05$), maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Maka dapat disimpulkan bahwa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tidak berpengaruh terhadap belanja modal.

c. Uji Signifikan Simultan (Uji f)

Untuk F_{tabel} dicari dengan menggunakan tingkat keyakinan 95% dan taraf signifikan 5% ($\alpha = 0,05$) maka $df_1 = \text{jumlah variabel} - 1 = 4 - 1 = 3$ dan $df_2 = n - k - 1 = 30 - 3 - 1 = 26$, maka diperoleh F_{tabel} sebesar 2,975. Maka hasil yang diperoleh adalah sebagai berikut:

Tabel 8. Hasil Uji Simultan (Uji F)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	84977025794562030000000.000	3	28325675264854010000000.000	6.174	.003 ^b
	Residual	119279193177152400000000.000	26	4587661276044323000000.000		
	Total	204256218971714430000000.000	29			
a. Dependent Variable: Belanja Modal (Y)						
b. Predictors: (Constant), SiLPA (X3), DAU (X2), PAD (X1)						

Sumber: Data diolah dengan SPSS versi 25 (2023)

Pada tabel 4.13 nilai $F_{\text{hitung}} > F_{\text{tabel}}$ dimana $6,174 > 2,975$ dengan tingkat signifikansi sebesar $0,003 < 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Hasil pengujian secara parsial (uji t) menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal pada Kabupaten yang ada di Provinsi Sumatera Utara tahun 2017-2021.
2. Hasil pengujian secara parsial (uji t) menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Belanja Modal pada Kabupaten yang ada di Provinsi Sumatera Utara tahun 2017-2021.
3. Hasil pengujian secara parsial (uji t) menunjukkan bahwa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Belanja Modal pada Kabupaten yang ada di Provinsi Sumatera Utara tahun 2017-2021.
4. Hasil pengujian secara simultan (uji f) menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.

Untuk penelitian selanjutnya disarankan agar mengambil sampel kabupaten/kota selain di Sumatera Utara untuk membandingkan apakah hasil penelitian ini berlaku untuk kabupaten/ kota diluar provinsi Sumatera Utara. Dan disarankan agar menambah atau mengubah variabel independen yang tidak dimasukkan kedalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Angelina, C., Clarina, C., Janice., Fanjaya, W. 2020. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan SiLPA terhadap pengalokasian Belanja Modal (studi kasus pada pemerintahan Kabupaten/Kota di Sumatera Utara). *Jurnal Akuntansi* : Vol.4 No.1, 138-147.
- Damanik, C. T. 2021. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) terhadap Belanja Modal (Studi Kasus Pada

- Kabupaten/Kota Pemerintah Provinsi Sumatera Utara) *Skripsi*. Universitas Sumatera Utara. Medan.
- Erlina, 2011. *Metodologi Penelitian*. Medan: Perpustakaan Nasional Katalog dalam Terbitan (KTD).
- Erlina, 2012. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi untuk Kerja Satuan Perangkat Daerah (SKPD)*. USU Press : Medan.
- Ghozali, Imam. 2018. *Aplikasi Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Utara. 2020. Kajian Fiskal Regional. <https://www.djpb.kemenkeu.go.id>. Diakses tanggal 03 Maret 2023.
- Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Utara. 2021. Kajian Fiskal Regional Semester II. <https://www.djpb.kemenkeu.go.id>. Diakses tanggal 09 Maret 2023.
- Mardiasmo, 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 *Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*.
- Republik Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 *Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Republik Indonesia, Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 *Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah*.
- Republik Indonesia, Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 *Tentang Pemerintahan Daerah*.
- Republik Indonesia, Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 *Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.
- Republik Indonesia, Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 *Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*.
- Sidik, M., & Simanjutak, R. 2005. *Dana Alokasi Umum, Konsep, Hambatan dan Prospek di Era Otonomi Daerah*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Sihombing, Yonge. 2011. *Manajemen APBD*. Medan: Penerbit Bina Media Perintis.
- Silfi, Puspita. 2019. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Dana Perimbangan, Pendapatan Asli Daerah Terhadap Alokasi Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota Sumatera Utara Periode 2012-2016. *Skripsi*. Universitas Sumatera Utara.
- Solikin, Ikin. 2010. Hubungan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum dengan Belanja Modal di Jawa Barat.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Suryani, Febdwi. 2018. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Riau. *Jurnal. Tidak Dipublikasikan*, Fakultas Ekonomi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pelita, Pekanbaru.
- Website Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara. <http://sumut.bps.go.id/>
- Website Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan(<http://www.djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd>)diakses, 9 Februari 2023.